

TIGA OPD DI PEMERINTAH KABUPATEN POSO MASUK ZONA HIJAU, OMBUDSMAN SULTENG BERIKAN PENGHARGAAN

Kamis, 09 Februari 2023 - Mohammad Risky S

POSO - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan piagam penghargaan kepada 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Poso yang telah berhasil masuk Zona Hijau pada Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 pada Kamis (9/2/23) di Gedung Pogombo Kantor Bupati Poso.

Kepala perwakilan Ombudsman Sulteng, M. Iqbal Andi Magga memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Poso, khususnya Dinas Dukcapil Poso, Dinsos Poso dan DPMPTSP Kabupaten Poso karena telah mencapai nilai yang baik dan memenuhi standar yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

"Pemda Poso menjadi salah satu dari pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dimana dari tahun lalu mendapat Predikat Zona Kuning namun di tahun ini masuk dalam Zona Hijau," ucap Iqbal.

"Meskipun demikian, OPD yang telah mendapat penghargaan diharap tidak berpuas diri dengan hasil yang dicapai, tetapi justru harus lebih meningkatkan kinerjanya di masa masa mendatang agar kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dapat terjaga dengan baik," lanjutnya.

Dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulteng menyerahkan Piagam Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik kepada Pemda Poso yang diterima langsung oleh Bupati Poso, Verna Gladys Mery Inkriwang dan 3 dinas yang mendapatkan penilaian baik dalam pelayanan publik yaitu Dinas Dukcapil Poso, Dinsos Poso dan DPMPTSP Kabupaten Poso.

Bupati Poso, Verna dalam sambutannya menyampaikan terima Kasih kepada Ombudsman RI atas kerja-kerja pengawasannya serta mengingatkan kepada OPD Kabupaten Poso harus terus melaksanakan pelayanan publik secara efektif, efisien dan transparan.

"Layanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karenanya, perbaikan pelayanan publik menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Verna.

"Kami berkomitmen untuk terus berusaha meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat agar penghargaan ini terus dapat kami pertahankan di tahun-tahun mendatang. Penghargaan ini jangan menjadikan kita cepat berpuas diri tetapi jadikan motivasi untuk terus bekerja sesuai ketentuan undang-undang," tutupnya.